

SINERGITAS PUSAT KULIAH KERJA NYATA DENGAN PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

VALUES | INNOVATION | PERFECTION



Latar Belakang

Waktu Pelaksanaan KKN di antara bulan Februari dan Agustus

Pusat Pengabdian Masyarakat dapat mengoptimalkan program unggulan yang telah di laksanakan oleh pusat KKN di antara waktu setelah pelaksanaan KKN



Kegiatan Pengabdian Masyarakat

• Internal

- Perluasan dan Penguatan Desa Mitra UII
- Hibah Internal UII
- Jurnal Abdimas Jamali

Eksternal

- Hibah Kemendikbud
- Hibah Non Kemdikbud
- Kolaborasi CSR



Yang Bisa di Sinergikan

• Perluasan Desa Mitra

- Adanya salah satu program Unggulan KKN
- Pengajuan Surat Permohonan pendampingan dari Mitra
- Program Jelas dan berkelanjutan
- Jarak Mitra Maksimum 200 km

Penguatan Desa Mitra

- Tindak Lanjut pendampingan Mitra tahun sebelumnya

Program disusun bersama DPL 1 dan DPL 2 untuk jangka waktu 3 tahun pendampingan.

Tahun 1 Pemetaan, tahun ke 2 penguatan, tahun ke 3 Branding dan kemandirian



Bagi Mitra yang belum dapat Terdampingi

- Pusat Pengabdian siap mendampingi dalam penyusunan proposal hibah internal eksternal minimal lengkap administrasi usulan

Internal UII	Dana
Pengabdian Unggulan KKN	Rp 10.000.000,-
Pengabdian Desa Mitra	Rp 15.000.000,-
Pengabdian Masyarakat Unggulan	Rp 25.000.000,-
Pengabdian Kolaborasi Wilayah	Rp 40.000.000,-

Hibah Pengabdian Unggulan Badan Wakaf UII Dana Rp 25.000.000,- bisa dilaksanakan di Desa Mitra PYBW

KEMDIKBUD

- **PENGABDIAN MONO TAHUN dan PENGABDIAN MULTI TAHUN**

MONO TAHUN	DANA	MULTI TAHUN	DANA/TAHUN
PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)	Rp 50.000.000,-	PEMBERDAYAAN MITRA USAHA PRODUK UNGGULAN DAERAH (Rp 175.000.000,-
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA (PMM)	Rp 80.000.000,-	PEMBERDAYAAN BERBASIS WILAYAH	RP 200.000.000,-
		PEMBERDAYAAN DESA BINAAN	Rp 150.000.000,-



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**DIKTI
SIGAP**
MELAYANI



PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

TERIMA KASIH
kepada DPL
Yang lolos
Proposal
Kemdikbud
2024

Kurikulum Sekolah Lansia "JUWEH" Dukungan Terciptanya Economic Empowerment dan Green Economy di kalurahan Gedongkiwo Yogyakarta

Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat

Ketua : PUNIK MUMPUNI WIJAYANTI **Tahun Pelaksanaan:2024**

Bidang Fokus : Kesehatan | Jumlah Anggota : 4

Lama Kegiatan : 1 Tahun

Tgl. perbaikan : 24-06-2024

Dana disetujui : **Rp39.969.000,00**

submitted

Dikti

PKM BAGI KELOMPOK PKK DESA BANDUNGREJO KABUPATEN MAGELANG

Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat

Ketua : LUTFI CHABIB **Tahun Pelaksanaan:2024**

Bidang Fokus : Kemandirian Kesehatan | Jumlah Anggota : 4

Lama Kegiatan : 1 Tahun

Tgl. perbaikan : 21-06-2024

Dana disetujui : **Rp43.750.000,00**

submitted

Dikti

Pemanfaatan Mesin Pencacah Rumput Hemat Energi yang Mempertimbangkan Aspek K3 dan Ergonomis pada Kelompok Ternak 99 Farm

Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat

Ketua : ELANJATI WORLDAILMI **Tahun Pelaksanaan:2024**

Bidang Fokus : Green Economy | Jumlah Anggota : 3

Lama Kegiatan : 1 Tahun

Tgl. perbaikan : 14-06-2024

Dana disetujui : **Rp49.979.000,00**

submitted

KEMDIKBUD MATCHING FUND KEDAIREKA



DIREKTORAT
PEMBINAAN & PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN/SIMPUL TUMBUH

- Skema B1 dan Skema B2

Raih Kesempatan
Pendanaan dengan
Total Dana

750 M



SKEMA B1

Penyelesaian Persoalan yang Ada di Masyarakat

Penyelesaian persoalan yang dimaksud dapat berupa peningkatan ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, dll, melalui rekacipta yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi. Program intervensi dilakukan bersama mitra instansi pemerintah, DUDI, atau Lembaga lainnya. Mitra instansi pemerintah dimaksud harus memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengadopsi, dan/atau mereplikasi program rekacipta dalam skala yang lebih luas. Mitra DUDI atau Lembaga lainnya yang dilibatkan harus memiliki kemampuan untuk mendanai kegiatan penerapan rekacipta dan mereplikasi program melalui CSR bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

SKEMA B2

Penyelesaian Persoalan yang Ada di Instansi Pemerintah



Kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi juga dapat diarahkan untuk peningkatan kualitas dan efisiensi layanan pemerintah untuk mengatasi isu-isu krusial secara nasional. Termasuk dalam kategori ini adalah pelaksanaan riset kebijakan (*policy research*) atau pengembangan sistem pendukung penyelenggaraan administrasi atau layanan pemerintah yang kesemuanya ditujukan untuk peningkatan efisiensi tatakelola pemerintahan, yang dapat berupa norma, standar, peraturan, dan kebijakan (NSPK). Persoalan krusial dimaksud serta solusi yang diharapkan harus berasal dari dan dirumuskan oleh mitra instansi pemerintah untuk kemudian disampaikan sebagai lampiran dari proposal.

Dr. Yulianto P. Prihatmaji, S.T., M.T., IAI, IPM. Rp 673.233.000
Skema B1 - Penguatan Pariwisata

Arif Fajar Wibisono, S.E., M.Sc. Rp 640.831.500
Skema B1 - Ekonomi Hijau

Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com (IS), Ph.D., CFA. Rp 451.786.000
Skema B2 - Non Tematik Umum